

Konstruksi Toleransi pada Akun Media Sosial Jaringan Gusdurian

Danar Kristiana Dewi; danar.dewi@ecampus.ut.ac.id; Universitas Terbuka
Lulus Sugeng Triandika; lulus.triandika@ecampus.ut.ac.id; Universitas Terbuka

Abstract

The role of tolerance is very important amid issues of division and radicalism. The spread of information on radicalism and extremism was met with resistance by many social organizations. They counter the issues of extremism and radicalism spread in society with issues of tolerance. This study aims to determine how tolerance messages are constructed on social media, especially on the Instagram account of Jaringan Gusdurian. This research employs qualitative approach with Entmant framing analysis techniques. Findings reveal that tolerance is constructed as a key to peace and unity in Indonesia. The problem of intolerance is caused by extremism. The moral values that legitimize tolerance are friendly religious Islam, solidarity transcendental insight of the Indonesian people. While the solutions offered to solve the problem of tolerance are caring for diversity and implementing the values of Pancasila in everyday life.

Keywords: Framing analysis, Instagram, social media, and tolerance.

Abstrak

Peran toleransi sangat penting ditengah isu perpecahan dan radikalisme. Persebaran informasi radikalisme dan ekstrimisme disambut perlawanan oleh beberapa organisasi sosial. Mereka melakukan counter isu ekstrimisme dan radikalisme yang tersebar di masyarakat dengan isu-isu toleransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pesan toleransi dikonstruksi di media sosial khususnya Instagram. Pisau penelitian yang dipilih adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis framing Entmant. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa toleransi dikonstruksikan sebagai kunci perdamaian dan persatuan di Indonesia. Persoalan intoleransi disebabkan oleh ekstrimisme. Nilai moral yang melegitimasi toleransi adalah islam agama yang ramah, solidaritas dan wawasan transedental bangsa Indonesia. Sedangkan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan toleransi adalah merawat keberagaman dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Analisis framing, Instagram, media sosial, dan toleransi.

A. Pendahuluan

Banjirnya arus informasi yang ada di internet disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor proses produksi pesan di mana dalam proses ini tidak ada pemisahan yang jelas antara produsen pesan dan konsumen pesan. Dalam internet, semua orang bisa berperan sebagai produsen sekaligus konsumen (prosumen) dalam sebuah pesan. Faktor kedua adalah kemudahan dalam membagikan konten. Tombol *share* yang terdapat dalam setiap posting yang ada di media sosial memudahkan pesan terdistribusi secara berantai hingga menjangkau ratusan ribu sampai jutaan pengguna. Faktor ketiga adalah ketergantungan masyarakat pada informasi yang diperoleh melalui inovasi teknologi yang semakin lama semakin berkembang.¹

Ketergantungan masyarakat terhadap informasi digital berkaitan dengan membanjirnya arus informasi. Hal ini berkaitan dengan *traffic data* akses informasi. Di internet, semakin sering sebuah informasi diakses maka semakin tinggi popularitas informasi tersebut. Semakin tinggi popularitas sebuah informasi maka akan semakin mudah terjangkau oleh audiens baik pembaca ataupun penonton. Semakin banyak audiens yang terjangkau oleh informasi, maka kemudian semakin luas akses dan respon terhadap informasi tersebut. Hal ini kemudian kita kenal sebagai istilah viral. Sebuah informasi yang viral baik di *website*, media online, ataupun media sosial akan menjadi sebuah isu publik yang diperbincangkan, dikomentari dan juga di *share* secara terus menerus. Dengan berkembangnya kecanggihan teknologi informasi yang berkembang bisa jadi pula diedit beraneka rupa oleh produsen yang juga sekaligus konsumen atas pesan tersebut. Berdasarkan tiga faktor dan kondisi masyarakat *technological* di atas, akan sangat riskan apabila informasi-informasi yang ada di internet tidak diregulasi dengan baik, maka *audience* akan sulit untuk mendapatkan informasi yang benar.²

¹ Novi Kurnia, "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Media Baru: Implikasi Terhadap Teori Komunikasi," *Mediator* 6, no. 2 (December 2005): 291–96.

² Rina Sari Kusuma and Nur Azizah, "Melawan Radikalisme melalui Website," *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 5 (September 6, 2018): 943, <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i5.267>.

Secara global, ditemukan kondisi banjirnya informasi di internet dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk menyebarkan konten dan propaganda. Golongan ini memanfaatkan fitur internet yang minim filter namun memiliki jangkauan yang luas. Weiman (2014) menunjukkan bahwa alasan kelompok radikal menggunakan internet sebagai medium adalah karena internet lebih populer dikalangan target pembaca mereka yakni generasi milenial. Hui, misalnya, juga menunjukkan bahwa propaganda ideologi ekstrimis dan radikal pada umumnya disebarakan melalui situs *website*.³

Propaganda yang dilakukan memiliki tujuan untuk menyebarkan radikalisme, rekrutmen anggota, perencanaan serta memperoleh dukungan keuangan. Ada lebih dari 5.500 situs *website* yang menyebarkan pengaruh ideologi Al-Qaeda di dunia dan setiap tahunnya situs tersebut meningkat sebanyak 900 kali.⁴ Di Indonesia, pemanfaatan internet sebagai alat propaganda oleh golongan radikal juga pernah diteliti oleh Iqbal (2014) yang menemukan bahwa kelompok radikal menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan komunikasi, mempromosikan identitas, menyebarkan ideologi, dan juga mengekspresikan pandangan mereka terhadap berbagai isu global dan nasional. Penyebaran propaganda di Indonesia, tidak hanya dilakukan melalui *website*, namun juga melalui media sosial.⁵

Dalam media sosial, propaganda ekstrimisme yang dilakukan secara eksplisit justru mengarah pada perpecahan antar umat beragama. Penelitian narasi media sosial di Indonesia tahun 2016 yang dilakukan oleh tim internal jaringan Gusdurian menemukan banyak kata kunci (*keyword*) yang mengandung unsur-unsur ekstrimisme. Dalam penelitian ini ditemukan, pesan-pesan penolakan terhadap

³ Jennifer Yang Hui, "The Internet in Indonesia: Development and Impact of Radical Websites," *Studies in Conflict & Terrorism* 33, no. 2 (January 21, 2010): 171–91, <https://doi.org/10.1080/10576100903400605>.

⁴ Shima D Keene, "Terrorism and the Internet: A Double-Edged Sword," *Journal of Money Laundering Control* 14, no. 4 (2011): 359–70.

⁵ Asep M. Iqbal, "Internet, Identity and Islamic Movements: The Case of Salafism in Indonesia," *Islamika Indonesiana* 1, no. 1 (June 7, 2014): 81–105, <https://doi.org/10.15575/isin.v1i1.42>.

keberagaman. Salah satunya adalah *labeling* terhadap istilah kafir dan non kafir. *Labeling* ini lalu memberikan implikasi pada gerakan masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap pemimpin kafir. Kondisi ini memperkeruh masa kontestasi politik yang berlangsung pada tahun 2016-2019. Pemelintiran informasi, informasi palsu (*hoax*) dan juga ujaran kebencian mewarnai halaman media sosial masyarakat Indonesia.

Penelitian Lina Herlina juga menunjukkan bahwa maraknya ujaran kebencian yang ada di media sosial ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap sikap intoleran di masyarakat. Ujaran kebencian, mengkotak-kotakkan masyarakat yang menerima informasi tersebut dalam kubu-kubu tertentu. Hujatan dan ujaran kebencian bahkan merucut pada *labeling* istilah tertentu dalam media sosial. *Labeling* ini diberikan dengan tujuan menyudutkan ataupun menyepelekan kelompok tertentu. Hujatan yang dilakukan di media sosial menggunakan istilah-istilah yang memiliki makna secara tersirat untuk ditujukan pada kelompok tertentu. Misalnya istilah yang ramai digunakan diantaranya adalah ‘kaum sumbu pendek, kaum bani taplak, bani serbet, kaum bumi datar, air kencing onta,’ dan banyak lagi istilah lainnya. Hujatan dengan istilah-istilah tersebut sebagian besar merujuk pada ‘penyudutan’ kelompok khususnya pada kelompok keagamaan, bukan pada perseorangan.⁶

Serangan pada kelompok beragama di Indonesia bukanlah tanpa sebab. Sejak tahun 2010 praktik pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 18% dari tahun-tahun sebelumnya.⁷ Pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia memicu konflik-konflik kekerasan horizontal ditengah masyarakat maupun konflik vertikal yakni antara masyarakat dan institusi pemerintahan.⁸ Persoalan ini semakin meruncing ketika bercampur dengan narasi-

⁶ Lina Herlina, “DISINTEGRASI SOSIAL DALAM KONTEN MEDIA SOSIAL FACEBOOK,” *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 1, no. 2 (October 1, 2018): 232–58, <https://doi.org/10.15575/jt.v1i2.3046>.

⁷ M. Subhi Azhari et al., “Lampu Merah Kebebasan Beragama,” Laporan Kebebasan Beragama Dan Toleransi Di Indonesia 2011 (Jakarta: the Wahid Institute, 2011).

⁸ Rini Fidiyani, “KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA (Belajar Keharmonisan Dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas),”

narasi yang memiliki nuansa politis yang membawa isu dan persoalan terkait suku, ras, dan agama. Dan menimbulkan tindakan kekerasan baik secara verbal di media sosial maupun konfrontasi secara langsung ditengah masyarakat.

Persoalan yang terjadi di media sosial ternyata berpengaruh terhadap sikap masyarakat, pada tahun 2017 saja, terdapat 155 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tercatat dengan 201 bentuk tindakan di mana sebanyak 75 kasus merupakan tindakan intoleran di masyarakat. Gejala ini dapat dilihat dari data tentang pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang menunjukkan bahwa pada tahun pelanggaran melibatkan aktor negara, yaitu 71 berbentuk tindakan aktif, 3 tindakan *by rule*, sementara 1 tindakan lainnya merupakan tindakan pembiaran. Sebanyak 126 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara dengan pelaku tertinggi adalah kelompok warga, yakni 28 tindakan.⁹

Menurut Survey yang dilakukan oleh *Social Progress Index* pada periode tahun 2014-2017, pada tahun 2016 skor toleransi beragama di Indonesia menduduki peringkat paling rendah yakni sebesar 29.57.¹⁰

Kondisi ini menekan pemerintah untuk mengeluarkan regulasi “bersuara” melalui media sosial dalam UU ITE. Pada tahun 2016 terdapat penambahan dalam pasal-pasal tertentu yang disesuaikan dengan kondisi terbaru penggunaan internet. Seperti pasal 40 ayat 2 tentang peran dan kewenangan pemerintah dalam penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal ini di sisipi tambahan a dan b dalam isi ayat 2. Pasal 40 ayat 2a berbunyi Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 2b berbunyi: Dalam

Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 3 (September 15, 2013): 468–82, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.256>.

⁹ Scholastica Gerintya, “Benarkah Intoleransi Antar-umat Beragama Meningkat?,” *tirto.id*, accessed October 14, 2019, <https://tirto.id/benarkah-intoleransi-antar-umat-beragama-meningkat-CEPz>.

¹⁰ Scholastica Gerintya.

melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Dari UU ini disimpulkan bahwa ada upaya dari pemerintah untuk mengatur, membatasi dan mengelola informasi di internet sehingga bisa meminimalisir dampak negatif akibat persebaran informasi tersebut. Salah satunya adalah persebaran informasi terkait propaganda radikalisme dan ekstrimisme. Undang-undang yang mengatur segala bentuk persoalan internet ini, diharapkan mampu menjadi garis batas masyarakat dalam berujar, like dan share informasi, ataupun berkomentar. Undang-undang ini juga menjadi tameng bagi pengguna internet agar tidak terpapar arus propaganda yang memecah belah situasi kebhinekaan Indonesia.

Sayangnya, persebaran informasi internet yang sangat cepat, tingginya konsumsi media sosial, literasi pengguna yang rendah atau tidak kritis terhadap informasi, dan *Post-truth* pengguna media sosial. Menyebabkan informasi sulit untuk dibendung.¹¹ Kondisi ini menyebabkan undang-undang ITE khususnya terkait penyebaran informasi belum berjalan maksimal. Hingga pada akhirnya melahirkan gerakan-gerakan baru di media sosial yang bertujuan untuk membendung arus informasi yang bermuatan propaganda terkait ekstrimisme, radikalisme, dan SARA.

Gerakan ini menyuarakan toleransi sebagai *counter* informasi negatif yang ada di media sosial. Salah satu gerakan organisasi sosial yang sangat aktif dalam menyuarakan toleransi adalah akun Instagram jaringan gusdurian. Organisasi ini merupakan arena sinergi bagi para Gusdurian (istilah pengikut Gusdur) di ruang kultural dan non politik praktis. Di dalam jaringan Gusdurian tergabung individu,

¹¹ Muslichatun et al., "PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *LONTAR MERAH* 2, no. 2 (December 2019): 179–93.

komunitas/forum lokal, dan organisasi yang merasa terinspirasi oleh teladan nilai, pemikiran, dan perjuangan Gusdur. Jaringan Gusdurian memfokuskan sinergi kerja non politik praktis pada dimensi-dimensi yang telah ditekuni Gus Dur yang meliputi 4 dimensi besar: Islam dan Keimanan, Kultural, Negara, dan Kemanusiaan. Dengan 4 dimensi tersebut gerakan ini fokus melakukan kampanye toleransi di media sosial, sebagai perwujudan atas nilai-nilai kemanusiaan.¹²

Kampanye toleransi yang dilakukan secara konsisten mampu menarik perhatian pengguna media sosial di Instagram. Saat ini jumlah pengikut (*follower*) di Instagram @jaringangusdurian mencapai 80.000 *follower*. Keberadaan akun ini tentu penting bagi perubahan sosial masyarakat yang disebabkan oleh pertukaran informasi di media sosial.

Dengan *follower* yang berjumlah 80.000 orang, akun @jaringangusdurian adalah media baru yang tercipta di internet. Sebagai media, akun ini memiliki kemampuan sebagai produsen pesan yang berpengaruh dan memiliki jangkauan audiens yang luas. Untuk itu, dirasa penting melihat bagaimana toleransi dikonstruksikan melalui akun ini hingga diterima oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan toleransi mampu menjadi benteng kultural bagi negara Indonesia dalam menghadapi konflik-konflik horizontal akibat propaganda radikalisme dan ekstrimisme yang ada di internet. Konstruksi toleransi akan dilihat dalam empat kategori yakni, definisi toleransi, sumber masalah toleransi, nilai moral yang diangkat dan solusi yang ditawarkan. Format penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.¹³

¹² "About Gusdurian," accessed July 19, 2019, <https://www.gusdurian.net/id/about-gusdurian>.

¹³ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Di Media Massa* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011).

Pisau analisis yang digunakan adalah metode analisis framing Robert Entman. Peneliti dalam hal ini bersifat non partisipan, dalam artian peneliti hanya mengamati dan mengumpulkan data. Sumber data Penelitian ini akan diperoleh dalam dua kategori yaitu sumber data Primer dan sumber data sekunder.¹⁴ Sumber data primer diperoleh melalui akun instagram media sosial jaringan Gusdurian.

Sampel yang dipilih adalah artikel yang diposting pada akun ini dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini, merupakan teknik pengambilan sampel yang diambil dengan tujuan tertentu atau disengaja. Pengumpulan data dilakukan selama satu tahun yakni pada bulan Juli 2018-Juli 2019. Sumber data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, wawancara dengan tim pengelola media sosial dan refrensi ilmiah seperti, jurnal, buku dan internet agar mendapatkan hasil yang relevan. Pengambilan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi dilakukan dengan menyalin dan menyimpan postingan di *feed* instagram dan buku untuk mendukung data penelitian.

B. Definisi Toleransi Sebagai Kunci Kedamaian dan Persatuan

Akun Instagram @jaringangusdurian sangat konsen dalam membahas permasalahan toleransi, khususnya toleransi antar umat beragama dan toleransi antar umat Islam sendiri. Dalam setiap postingan yang ditemukan selama bulan Juli 2018 hingga bulan Juli 2019 yang berisikan tentang definisi toleransi selalu ditekankan bahwa toleransi adalah kunci yang bisa menciptakan kedamaian hidup dan menciptakan kesatuan antar umat manusia. Toleransi merupakan usaha untuk menghargai perbedaan, mengasihi dan berbagi kebaikan kepada siapapun baik yang berbeda secara agama, suku dan warna kulit. Dalam postingan ini turut disertakan bukti di dalam Al-qur'an yakni surat Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah yang menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui,*".

¹⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996).

Dengan disertakannya surat ini dalam postingan definisi toleransi secara implisit kita bisa melihat bahwa akun Instagram jaringangusdurrian ingin membingkai bahwa Islam dalam hal ini justru sangat mendukung sikap toleran. Hal ini dibuktikan dan diperkuat pada hari toleransi internasional, akun @jaringangusdurrian menulis: *“Tidak ada batasan atau larangan kerjasama antara Islam dengan agama lain. Terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan kemanusiaan,” (Disampaikan saat hari toleransi internasional)*

Dalam hal ini toleransi dilihat tidak hanya dalam permasalahan kemanusiaan. @jaringangusdurrian melihat toleransi juga merupakan masalah keislaman. Hal ini bisa dilihat dari dua postingan terkait toleransi, yang pertama dilandasi dengan ayat Al-qur’an yakni surat Ar-Rum ayat 22 yang berisikan tentang kekuasaan Allah yang membuat semua yang ada di bumi ini tidak sama dan berlainan, maka heterogenitas dilihat oleh @jaringangusdurrian sebagai sebuah fitrah alam yang sudah dikehendaki oleh Sang Pencipta. Maka, karena heterogenitas adalah fitrah tidak ada batasan ataupun larangan kerjasama antara Islam dengan agama lain apalagi permasalahan kemanusiaan. Artinya, dengan ketetapan ini wajib bagi muslim untuk bersikap toleran.

Toleransi didefinisikan juga sebagai sikap kemuliaan, sebuah sikap mengagungkan kebesaran Tuhan. Dengan ketetapan yang telah dibuat oleh Alloh segala sesuatu di muka bumi ini berbeda-beda, maka toleran dengan ciptaan Alloh merupakan sebuah sikap yang mulia, karena dengan memuliakan manusia sama halnya dengan memuliakan sang pencipta dan sebaliknya. Merendahkan manusia berarti merendahkan Penciptanya. Definisi ini tersirat dalam postingan pada tanggal 16 November 2018 :



Gambar 2. Narasi inti toleransi oleh akun IG @jaringangusdurian.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh YB. Mangunwijaya tentang toleransi. Menurutnya, yang harus diperhatikan dalam beragama bukan *to have religion*, akan tetapi *being religious*. Dalam *to have religion* yang dipentingkan adalah formalisme agama sebagai kata benda. Sedang *dalam being religious* yang dipentingkan adalah penghayatan dan aktualisasi terhadap substansi nilai-nilai luhur agama.¹⁵ Dengan memuliakan manusia, tidak membedakan warna kulit, kemudian bersikap menghormati satu sama lain, maka manusia telah bersikap toleran. Untuk mewujudkan hal ini, maka diperlukan sebuah konstruksi pemikiran bahwasanya manusia satu dengan manusia yang lain memiliki kesetaraan dan hak yang sama dalam *being religious*.

Hastag #bedasetara, dengan demikian, selalu ada dalam setiap postingan yang berkaitan dengan arti toleransi. Dalam wawancara dengan salah satu pegiat akun media sosial @jaringangusdurian, Kalis Mardiasih, dijelaskan bahwa maksud dari toleransi sebagai sebuah kesetaraan bersifat sangat luas, setara tidak hanya berkaitan dengan gender namun dalam hal ini toleransi merupakan jalan menuju

¹⁵ YB. Mangunwijaya, "Pergeseran Titik Berat Dari Keragaman Ke Religiusitas," in *Spiritualitas Baru: Agama Dan Aspirasi Rakyat*, II, vol. 1, Seri Dian (Jakarta: Kanisius, 1994).

kesetaraan, baik itu setara sebagai manusia atau setara sebagai warga negara. Toleransi menjadi sebuah jalan dan solusi masyarakat yang memiliki keragaman tinggi untuk bisa hidup rukun bersama-sama.

C. *Diagnose Causes: Penyebab Masalah Seputar Toleransi*

Penyebab permasalahan toleransi yang pertama adalah Ekstrimisme. Ekstrimisme merupakan paham atau keyakinan yang begitu kuat terhadap sebuah pandangan, melebihi batas kewajaran dan melanggar hukum yang berlaku. Dalam pengertian lain, ekstrimisme merupakan sebuah doktrin baik itu politik ataupun agama untuk menggerakkan aksi dengan berbagai cara demi mewujudkan tujuannya. Ekstrimisme dianggap sebagai sumber permasalahan toleransi yang terjadi khususnya di Indonesia.

Paradigma toleransi yang terbuka, damai terhadap semua manusia bertolak belakang dengan nilai ekstrimisme, sehingga sangat realistis apabila akun jaringan gusdurian beranggapan bahwa salah satu penyebab utama persoalan toleransi adalah ekstrimisme. Ekstrimisme juga dirasa berkebalikan dengan nilai-nilai Pancasila. Ekstrimisme dalam konteks ini dibingkai ekstrimisme dalam hal beragama. Ekstrimisme dirasa bisa mempengaruhi ideologi masyarakat dan berlawanan dengan ideologi negara Indonesia yakni Pancasila yang secara jelas mengedepankan sikap toleransi. Pesan toleransi ini tertulis secara jelas dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pesan ini tersurat dalam postingan pada tanggal 8 November 2019: "*Pancasila mencerminkan ketauhidan, didalamnya terkandung nilai-nilai Islam seperti keadilan, toleransi dan musyawarah. Karenanya tidak ada alasan bagi muslim Indonesia untuk menolak Pancasila,*"

Dari postingan ini, narasi ekstrimisme yang disorot adalah ekstrimisme beragama, khususnya ekstrimisme yang muncul dalam golongan–golongan tertentu dalam tubuh agama Islam. Secara eksplisit dalam postingan ini disebutkan bahwa tidak ada alasan muslim menolak Pancasila. Hal ini menunjukkan kritik atas gerakan ekstrim yang memasuki tubuh Islam di Indonesia dan menyebarkan propaganda. Salah satu propaganda tersebut adalah menolak nilai-nilai Pancasila.

Dari pengamatan peneliti, akun ini memang lebih fokus terhadap narasi ekstrimisme khususnya ekstrimisme dalam konteks beragama. Sehingga konstruksi atas penyebab masalah intoleransi yang ada di Indonesia memang lebih banyak dibahas dari sudut pandang religi. Ekstrimisme dilihat sebagai titik awal bagi seseorang untuk kemudian menjadi radikal. Dogma ekstrimisme yang hanya mengkooptakkan manusia dalam satu sudut pandang saja berpengaruh terhadap pandangan dan perilaku sosial manusia. Dalam ilmu komunikasi, sikap sebuah kelompok yang menolak nilai-nilai dan pandangan dari kelompok lain disebut kohesif.

Ivancevich dkk mengatakan bahwa kelompok yang kohesif merupakan kesatuan. Anggota-anggotanya menikmati interaksi diantaranya dan tetap bersatu dan bertahan dalam waktu yang lama. kohesivitas biasanya dianggap sebagai sebuah kekuatan. Kohesivitas mengikat seluruh anggota kelompok agar tetap berada dalam kelompoknya dan menangkal pengaruh yang menarik anggota agar keluar dari kelompok. Sebuah kelompok yang kohesif terdiri dari individu-individu yang saling tertarik satu dengan yang lain. Keterikatan yang kuat dalam kelompok kohesif berpengaruh terhadap sikap individu untuk menerima dan mentolerir pandangan lain.¹⁶ Sikap kohesif ini, apabila dikembangkan akan sangat berbahaya dalam konsep kebhinekaan Indonesia yang multikultural.

Lebih jauh, ekstrimisme yang ada di media sosial menghasut dan memecah belah banyak pihak. Bahkan secara terang benderang dikatakan bahwa ekstrimisme telah menggunakan agama sebagai bungkus gerakan mereka. Akun ini melakukan kritik atas fenomena hijrah yang muncul di Indonesia dengan mengatakan bahwa hijrah seharusnya dimaknai dengan menjadi manusia yang bisa lebih toleran dan menerima keberagaman, bukan kemudian menjadi kelompok eksklusif yang gemar menyalahkan hingga menuduh kafir kelompok lainnya.

¹⁶ John M. Ivancevich, Robert Konopaske, and Michael T. Matteson, *Perilaku Dan Manajemen Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 2007).

Pandangan eksklusif seperti ini, dikonstruksi sebagai persoalan yang turut menjadi penyebab masalah toleransi di Indonesia. Mengingat, Indonesia bukanlah sebuah negara homogen yang hanya memiliki satu suku, agama atau ras yang sama. Akan tetapi Indonesia adalah negara yang memiliki heterogenitas yang tinggi. Pandangan eksklusif terhadap golongan akan membentuk sikap kohesif yang tidak mau menerima perbedaan. Kelompok eksklusif kemudian akan mudah menyalahkan orang lain yang berbeda pandangan, pemerintah dan negara. Dalam postingan terkait ini dilengkapi pula dengan hastag #indonesiarumahbersama. Tanda pagar (# = tagar) ini menegaskan kritik atas kelompok eksklusif yang menolak keberagaman.



Gambar 4. Narasi konsep hijrah dalam konteks Indonesia sebagai rumah bersama

Selanjutnya, kondisi ini semakin buram karena pada tahun 2016-2019 merupakan masa dimana Indonesia sedang menggelar perhelatan pesta demokrasi (Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden). Jadilah narasi ekstrimisme ini masuk dalam situasi politik yang ada di Indonesia. Narasi ekstrimisme kemudian mendorong publik untuk saling balas komentar negatif, hujatan dan fitnah melalui media sosial. Kondisi ini kemudian mendorong munculnya banyak sekali ujaran kebencian di media sosial. Ujaran kebencian yang bersahutan di media sosial menimbulkan dan memicu tindakan intoleransi.

Tindakan intoleransi yang melahirkan kekerasan dalam beragama dan berkeyakinan, hakikatnya tidak dibenarkan dalam agaman manapun. Kekerasan selalu bersifat jahat, kriminal atau amoral. Hanya letak persoalannya barangkali

bukan di sini, tetapi pada kenyataan bahwa agama dan kekerasan mempunyai keterkaitan ketika dikaitkan dengan pertimbangan etika-religius. Sehingga teks-teks keagamaan seringkali dimaknai dan diplintir untuk tujuan-tujuan tertentu yang berjangka pendek. Penyebaran kekerasan dalam agama justru menjadi alat strategis untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan mengingat agama memiliki kemampuan untuk memberi sanksi moral terhadap penerapan kekerasan, sementara kekerasan merupakan kekuatan potensial yang dapat melahirkan entitas-entitas non-legal. Dari sini agama menjadi alat politis yang cukup potensial.¹⁷

D. Nilai Moral yang Disajikan

Dari analisis postingan akun Instagram @jaringangusdurian ditemukan tiga point besar terkait nilai moralitas yang digunakan dalam melegitimasi pentingnya aplikasi nilai-nilai toleransi di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tiga nilai moral yang disebut dijabarkan dalam penjelasan di bawah.

Nilai moral pertama berkaitan dengan toleransi beragama, khususnya di agama Islam. Islam seharusnya menjadi *rahmatan lil alamin* bagi semesta dan seluruh umat manusia. Di Indonesia, sebagai agama terbesar Islam harus menunjukkan identitas sebagai agama yang ramah bukan agama yang marah. Konten ini secara eksplisit disampaikan pada tanggal 18 September 2018. “*Semakin tinggi Ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Kita butuh Islam yang ramah bukan Islam yang marah. Tuhan tidak perlu dibela*”.

¹⁷ Ahmad Isnaini, “Kekerasan Atas Nama Agama,” *KALAM* 8, no. 2 (February 22, 2017): 213, <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.221>.



Gambar 5. Narasi Islam agama yang ramah.

Dalam hal ini, putusan moral yang dibuat dalam kondisi ini adalah: Toleransi dan Islam itu adalah wajib, apalagi bagi mereka yang memiliki pendidikan tinggi, seharusnya memiliki rasa toleransi yang besar. Dalam masalah toleransi, Islam harus menunjukkan jati dirinya sebagai agama yang ramah bukan agama yang marah. Sebagai agama yang ramah Islam sepatutnya mendukung toleransi setinggi-tingginya. Salah satu cara untuk mendukung toleransi adalah dengan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia.

Nilai kedua, dalam putusan moral ini adalah bahwa seluruh lapisan masyarakat harus menjunjung tinggi solidaritas dalam keberagaman, baik itu perbedaan dalam keyakinan, adat, etnis, hingga persoalan politik. Putusan moral ini termaktub dalam postingan pada tanggal 14 November 2018 : *“Indonesia dibangun atas keberagaman suku, budaya, ras, bahasa dan agama. Muslim di Indonesia harus sangat menghargai keberagaman, jika tidak indonesia akan bubar,”*.



Gambar 6. Narasi keberagaman di Indonesia.

Nilai ketiga, Persoalan moral toleransi dikaitkan dengan wawasan transedental masyarakat Indonesia. Wawasan transedental yang dimiliki oleh masyarakat akan memungkinkan masyarakat untuk menghormati dan menghargai harkat dan martabat orang lain.

E. Solusi yang Ditawarkan untuk Menyelesaikan Persoalan Toleransi

Dalam pembahasan ini dibahas tentang bagaimana solusi yang ditawarkan oleh media untuk menyelesaikan persoalan toleransi di Indonesia. Rekomendasi penyelesaian masalah disesuaikan dengan persoalan dan dari sudut pandang mana masalah diamati. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan tiga rekomendasi penyelesaian persoalan yang dianggap bisa menjadi solusi atas persoalan toleransi.

Pertama, @jaringangusdurian merekomendasikan masyarakat untuk menjaga dan merawat persaudaraan antar umat beragama sebagai solusi persoalan toleransi. Rekomendasi ini diberikan dengan dasar bahwa banyak di negara-negara Islam yang telah hancur lebur kedamaianya karena konflik agama. Merujuk pada postingan tanggal 2 November 2018: *“Relakah kita Indonesia yang damai dan rukun hancur lebur seperti Syiria karena konflik agama? Ayo rawat Indonesia, ayo jaga persaudaraan kita. Kita tidak ingin tentu Indonesia dibuat seperti Syiria bukan?”*.

Pesan ini diperkuat dengan gambar yang menunjukkan kondisi perang di Syiria dan kondisi silaturahmi antar umat beragama di Indonesia.



Gambar 7. Narasi konflik beragama yang terjadi di Syiria.

Pesan moral bahwa masyarakat Indonesia harus menjaga dan merawat persaudaraan sebagai solusi permasalahan toleransi kembali diperkuat dengan narasi cara-cara merawat solidaritas antar umat beragama. Hal ini terlihat pada posting tanggal 11 Februari 2019 yang mendorong umat muslim sebagai agama mayoritas di Indonesia turut menjaga tempat Ibadah agama lain, bukan merusak atau menghancurkan. Dalam narasi ini turut disertakan dalil dalam Al-qur'an surat Al-Hajj ayat 40. Isi narasi tersebut adalah: *“Al-quran memerintahkan kepada umat Islam untuk melindungi tempat ibadah agama lain. Dalam artian tidak membakar, merusak atau menghancurkannya, Betapa mulia perintah dan ajaran umat islam dalam Al-quran”*



Gambar 8. Narasi menjaga keberagaman dan rumah Ibadah agama lain.

Kedua, solusi yang direkomendasikan adalah implementasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila mencerminkan ketauhidan, didalamnya terkandung nilai Islam seperti keadilan, toleransi dan musyawarah.

Solusi ketiga adalah, sebagai bangsa Indonesia seharusnya masyarakat mengembangkan sikap meninggikan kepentingan bersama dan mengalahkan kepentingan pribadi, kemajemukan harus bisa diterima tanpa adanya perbedaaan. Solusi ini merujuk pada postingan yang ditulis pada tanggal 22 februari 2019, yaitu: *“Pertanyaan dasarnya adalah sanggupkah kita sebagai bangsa mengembangkan*

sikap meninggikan kepentingan bersama dan mengalahkan kepentingan pribadi para pemimpin bangsa kita? Kemajemukan harus bisa diterima tanpa adanya perbedaan. KH. Abdurahman Wahid (Celoteh Gus Dur, Jakarta 2017, Hal.47).



Gambar 9. Narasi tentang mengedepankan kepentingan bersama oleh Gusdur.

F. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa toleransi dikonstruksikan sebagai persoalan agama dan budaya oleh akun @jaringangusdurian. Toleransi secara khusus dikonstruksikan sebagai persoalan krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Toleransi didefinisikan sebagai salah satu cara yang bisa dilakukan agar masyarakat Indonesia yang hidup di tengah keberagaman bisa tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

Kedua, ekstrimisme dikonstruksikan sebagai penyebab tunggal atas persoalan praktek intoleransi yang terjadi. Sikap dan keyakinan yang kuat pengikut paham ekstrimisme tentang sebuah pandangan dianggap bisa menjadi momok yang bisa merusak ideologi pancasila.

Ketiga, nilai-nilai yang diangkat untuk melegitimasi pentingnya persoalan toleransi untuk diperhatikan secara khusus adalah nilai toleransi beragama,

khususnya agama Islam sebagai agama yang ramah. Selanjutnya adalah rasa solidaritas antar umat beragama dan wawasan transedental masyarakat Indonesia.

Keempat, solusi yang ditawarkan oleh @jaringangusdurian untuk menyelesaikan persoalan toleransi adalah meningkatkan rasa memiliki, mencintai dan merawat keberagaman antar umat beragama di Indonesia. Untuk merawat keberagaman ini, diperlukan implementasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi.

Daftar Pustaka

- “About Gusdurian.” Accessed July 19, 2019. <https://www.gusdurian.net/id/about-gusdurian>.
- Ahmad Isnaini. “Kekerasan Atas Nama Agama.” *KALAM* 8, no. 2 (February 22, 2017): 213. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.221>.
- Burhan Bungin. *Konstruksi Sosial Di Media Massa*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Iqbal, Asep M. “Internet, Identity and Islamic Movements: The Case of Salafism in Indonesia.” *Islamika Indonesiana* 1, no. 1 (June 7, 2014): 81–105. <https://doi.org/10.15575/isin.v1i1.42>.
- Jennifer Yang Hui. “The Internet in Indonesia: Development and Impact of Radical Websites.” *Studies in Conflict & Terrorism* 33, no. 2 (January 21, 2010): 171–91. <https://doi.org/10.1080/10576100903400605>.
- John M. Ivancevich, Robert Konopaske, and Michael T. Matteson. *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Lexy J. Moeloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Lina Herlina. “DISINTEGRASI SOSIAL DALAM KONTEN MEDIA SOSIAL FACEBOOK.” *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 1, no. 2 (October 1, 2018): 232–58. <https://doi.org/10.15575/jt.v1i2.3046>.
- M. Subhi Azhari, Nurun Nisa, Alamsyah M. Dja’far, and Badrus Samsul Fata. “Lampu Merah Kebebasan Beragama.” *Laporan Kebebasan Beragama Dan Toleransi Di Indonesia 2011*. Jakarta: the Wahid Institute, 2011.
- Muslichatun, Nur Rahmawati, Winna Wahyu Permatasari, and Afriza Fitri Mahgfiroh. “PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.” *LONTAR MERAH* 2, no. 2 (December 2019): 179–93.
- Novi Kurnia. “Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Media Baru: Implikasi Terhadap Teori Komunikasi.” *Mediator* 6, no. 2 (December 2005): 291–96.

- Rina Sari Kusuma, and Nur Azizah. "Melawan Radikalisme melalui Website." *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 5 (September 6, 2018): 943–57.
<https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i5.267>.
- Rini Fidiyani. "KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA (Belajar Keharmonisan Dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (September 15, 2013): 468–82.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.256>.
- Scholastica Gerintya. "Benarkah Intoleransi Antar-umat Beragama Meningkat?" *tirto.id*. Accessed October 14, 2019. <https://tirto.id/benarkah-intoleransi-antar-umat-beragama-meningkat-cEPz>.
- Shima D Keene. "Terrorism and the Internet: A Double-Edged Sword." *Journal of Money Laundering Control* 14, no. 4 (2011): 359–70.
- YB. Mangunwijaya. "Pergeseran Titik Berat Dari Keragaman Ke Religiusitas." In *Spiritualitas Baru: Agama Dan Aspirasi Rakyat*, II. Vol. 1. Seri Dian. Jakarta: Kanisius, 1994.